

PENGARUH EMBARGO SENJATA AS TERHADAP KERJASAMA TEKNIK MILITER RI-RUSIA TAHUN 2003

Anastacia Patricia Novlina Nurak¹, Wiwik Dharmiasih², A.A Bgs Surya Widya Nugraha³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Email : anastacianovlina@gmail.com¹ ; wiwikd@gmail.com² ; aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

This research described the influence of arms embargoes from U.S for Indonesia's military in 1999 that implied the military technical cooperation between Indonesia and Rusia in 2003. This research is using qualitative method with literature review and secondary data. This research using security dilemma concept for observed the increase of military capability from countries around Indonesia when Indonesia's military capability has decrease because of U.S embargo, and then using defensive realism theory for apprehend Indonesia's action to build military technical cooperation with Rusia. The result from this research showed that U.S arms embargo causes the reduction of Indonesia's military power and security dilemma in Indonesia. The conclusion from this research is U.S arms embargo influenced Indonesia's action for build on military cooperation with Rusia, which is the behavior from defensive realism.

Keyword : Influence, U.S Arms Embargo, Military Technical Cooperation between RI-Rusia 2003, Security Dilemma

1.PENDAHULUAN

Kekuatan militer merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas negara. Semua negara termasuk Indonesia membangun kekuatan militernya untuk menjaga keamanan nasional sekaligus memenuhi kepentingan nasional. Pertahanan keamanan nasional yang mumpuni sangat dibutuhkan oleh negara kepulauan seperti Indonesia. Luas wilayah kedaulatan sebesar 1.890.754 km² sebagaimana dikutip dalam website resmi ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan wilayah terluas di Asia Tenggara sehingga hal tersebut membuat Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan militernya dalam situasi apapun.

Kekuatan militer Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik dengan menduduki peringkat ke-19 di dunia (*Global Fire Power*, 2015) namun tentunya hal tersebut tidak lepas dari berbagai kerjasama pertahanan yang dibangun Indonesia dengan negara lain.

Dimasa lampau bahkan hingga saat ini, Indonesia menjalin kerjasama di bidang pertahanan keamanan dengan

negara lain yang militernya lebih mumpuni seperti Amerika Serikat (AS) serta Rusia. Berbicara mengenai kerjasama tentunya tidak selalu berjalan lancar, salah satu permasalahan yakni keluarnya keputusan embargo senjata dari pihak AS terhadap militer Indonesia sebagai respon atas tindakan Indonesia dalam penyelesaian kasus Timor-Timor (sekarang Timor Leste) pada tahun 1999.

Keputusan embargo senjata dari AS ini cukup berdampak bagi kekuatan militer Indonesia yang saat itu hampir 70% suku cadangnya berasal dari Amerika Serikat (Sulistyo, 2012). Dampak embargo tersebut sangat berpengaruh, terutama akibat ketidakmampuan Indonesia dalam tahap *arms maintenance* sehingga mengakibatkan banyak senjata yang tidak dapat digunakan (*grounded*). Menghadapi permasalahan embargo senjata tersebut, kekuatan militer Indonesia menjadi stagnan dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga kedaulatan berupa penjagaan batas wilayah, batas udara dan lain sebagainya.

Kekuatan militer Indonesia yang saat itu sedang stagnan akibat diembargo pada tahun 1999/2000 semakin diperburuk dengan meningkatnya pertumbuhan militer negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya belanja pertahanan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dengan 4,358 juta US\$ pada tahun 2001 menjadi 4,582 juta US\$ di tahun 2002, kemudian Malaysia dengan 1,921 juta US\$ pada tahun 2001 menjadi 1,973 juta US\$ di tahun 2002 (*The Military Balance*, 2003-2004).

Pasca Perang Dingin persaingan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia sudah terlihat, sebagaimana diprediksi melalui anggaran pengeluaran militernya. Menurut *The Military Balances* 1997-1998, anggaran belanja militer Indonesia dengan 1.402 juta US\$ dan Thailand sebesar 1.653 juta US\$ merupakan terbanyak di kawasan Asia Tenggara disusul dengan beberapa negara lainnya seperti Malaysia dan Filipina.

Melihat dampak permasalahan embargo senjata yang dilakukan AS pada 1999 tersebut maka Indonesia berupaya untuk membangun kerjasama militer yang kondusif. Kerjasama militer pun dibangun

dengan negara lain yang lebih maju dalam perkembangan alutsista, dimana salah satunya ialah Rusia yang menjadi mitra strategis RI. Hubungan kerjasama antara RI dan Rusia sendiri sudah terjalin cukup lama dengan berbagai pasang surutnya. Keharmonisan hubungan RI dan Rusia ditandai dengan disepakatinya Persetujuan Kerjasama Teknik Militer antar kedua negara pada tahun 2003.

Kerjasama dengan pihak Rusia membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan tersebut ialah kemajuan alutsista yang dimiliki Rusia lebih baik dari Indonesia yakni menempati peringkat ke-2 dunia menjadi salah satu alasan tepat untuk menjalin kerjasama militer (Moeldoko, 2014). Melalui kerjasama teknik militer dengan Rusia, pemerintah Indonesia ingin mengembalikan kemampuan militernya yang stagnan akibat embargo senjata dari Amerika Serikat.

Berdasarkan gambaran tersebut, terdapat sebuah permasalahan menarik yang ingin diteliti lebih lanjut. Permasalahan tersebut ialah bagaimana embargo senjata yang dilakukan Amerika Serikat berpengaruh terhadap terbangunnya kerjasama teknik militer antara RI dan Rusia tahun 2003.

2. KAJIAN PUSTAKA

Rusia merupakan salah satu partner strategis Indonesia dalam melaksanakan berbagai kerjasama di berbagai bidang, salah satu kerjasama yang terjalin adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa penelitian mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia-Rusia telah ada sebelumnya dan dapat dijadikan sumber pustaka dalam penelitian ini. Terdapat tiga sumber kajian pustaka yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti working paper yang berjudul *Strategic Realignment or Déjà vu? Russia-Indonesia Defence Cooperation in 21st Century* karya Muraviev, A., & Brown, C (2008), kemudian tesis berjudul "Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 Dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara" karya Iwan Sulisty (2012) serta artikel ilmiah dengan judul *Is Iran an Offensives Realist or a Defensive Realist? A*

Theoretical Reflection on Iranian Motives for Creating Instability yang ditulis oleh Rusty Treviño dalam *Journal of Strategic Security Volume 6 IAFIE Conference: Expanding the Frontiers of Intelligence Education* tahun 2013.

Kajian pustaka yang pertama merupakan *working paper* karya Muraviev, A., & Brown, C yang terbit tahun 2008, tulisan ini membahas dari awal mengenai sejarah kerjasama pertahanan antara Indonesia-Rusia. Tulisan Muraviev, A., & Brown, C (2008) juga merangkum poin penting yang menyebabkan pengaturan kembali kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia pada awal abad 21 setelah sempat harmonis kemudian memburuk. *Working paper* ini membantu untuk melihat baik perjalanan hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia dengan berbagai realisasinya serta alasan yang melatarbelakanginya. Perbedaan dari tulisan ini dengan penelitian

yang dilaksanakan terletak pada fokus penulisan serta lokus penelitian. Dalam penelitian ini fokus penulisan terletak pada pengaruh dari embargo AS terhadap Indonesia yang dianalisa melalui kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2003.

Selanjutnya kajian pustaka yang *kedua* ialah tesis dengan judul "Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara" karya Iwan Sulisty (2012). Sulisty (2012) memaparkan analisa tentang respon Indonesia melalui berbagai kebijakan pertahanan dalam menghadapi pembangunan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 1997/98 hingga tahun 2010. Tulisan ini membahas beberapa poin penting terkait berbagai kebijakan pertahanan Indonesia dimana menurut Sulisty (2012) salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Rusia untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia. Tulisan Sulisty (2012) digunakan pula untuk melihat kerjasama Indonesia dan Rusia sebagai respon terhadap dilemma keamanan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Sulisty (2012) juga mengatakan bahwa usaha peningkatan kapabilitas militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara disebabkan oleh munculnya situasi *security dilemma* terutama setelah belanja militer yang cukup besar oleh Singapura dan Malaysia.

Kemudian kajian pustaka yang *ketiga* ialah artikel ilmiah dengan judul *Is Iran an Offensives Realist or a Defensive Realist? A Theoretical Reflection on Iranian Motives for Creating Instability* yang ditulis oleh Rusty Treviño dalam *Journal of Strategic Security Volume 6 IAFIE Conference: Expanding the Frontiers of Intelligence Education* tahun 2013. Tulisan Treviño (2013) menguraikan tentang sejarah awal revolusi islam yang terjadi hingga perkembangan posisi Iran saat ini di kancan Internasional. Treviño (2013) juga membahas mengenai ancaman yang dialami Iran dari negara sekitarnya di wilayah timur tengah seperti Israel, Saudi Arabia, Qatar, Turki, hingga Amerika Serikat dalam membangun stabilitas negaranya. Menurut Treviño (2013), Salah satu ancaman yang cukup besar ialah sanksi ekonomi dari AS yang diupayakan oleh AS dengan mitra kerja Iran akibat usaha peningkatan Iran dalam teknologi

nuklirnya. Selain itu, Treviño (2013) juga memaparkan mengenai bentuk respon Iran dalam mengatasi ancaman dari negara sekitar dan sanksi ekonomi dari AS dari sudut *Offensive Realism* dan *Defensive Realism*.

Dilihat dari sudut *Defensive Realism* Iran mengatasi ancaman dari negara sekelilingnya dan AS dengan membangun relasi dengan kelompok non negara seperti Hezbollah dan Hamas untuk membantu mengamankan selat Hormuz yang merupakan jalur perdagangan minyak Iran, selain itu Iran juga membangun hubungan yang cukup dekat dan tidak diketahui seberapa dalam hubungan relasi yang dimilikinya dengan Irak. Melalui tulisan Treviño (2013) ini dapat dilihat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni Indonesia dan Irak memiliki respon yang sama dari sudut *defensive realism* dalam mengatasi ancaman keamanan dari negara di sekitarnya juga mengatasi sanksi/embargo dengan menjalin kerjasama baik dengan organisasi non negara maupun dengan negara. Ketiga sumber kajian pustaka tersebut terdapat kemiripan terkait kerangka konsep maupun teori yang digunakan yakni penggunaan sudut pandang realis yang dipertegas melalui teori *defensive realism* serta penjabaran lebih jauh menggunakan konsep *security dilemma*.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan teori serta beberapa konsep yang mendukung dalam menganalisa lebih jauh bagaimana embargo senjata AS berpengaruh terhadap munculnya kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia. Embargo memiliki berbagai jenis, namun dalam penelitian ini embargo khusus mengarah pada embargo senjata. Embargo merupakan pelarangan perniagaan dengan sebuah negara dan biasanya dilakukan oleh satu/sekelompok negara terhadap negara lain untuk membatasinya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit (Rachmawatie, 2014). Selain itu menurut paragraph 2 Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) no. 1390 (2002) termasuk paragraf 1 (c) resolusi DK PBB no. 2161 (2014) embargo senjata ialah ;

"Prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, to these [the listed] individuals, groups, undertakings and entities from their

territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned and technical advice, assistance, or training related to military activities."

Terminologi mengenai embargo senjata yang dikutip dari dewan keamanan PBB menunjukkan bahwa embargo senjata merupakan bentuk pelarangan akan *supply* atau pasokan baik senjata, maupun suku cadang dan apapun yang berkaitan dengan aktifitas militer kepada pihak yang biasanya menerima pasokan tersebut (negara). Penelitian ini melihat melalui sudut pandang realis yang dipertegas melalui teori *defensive realism* serta diperjelas dengan penggunaan konsep *security dilemma*.

Security Dilemma atau konsep ancaman keamanan merupakan sebuah situasi dimana negara mengalami kerisauan atau dilemma terkait keamanan terhadap perubahan terutama situasi militer negara lain disekitarnya. Istilah dilema keamanan sendiri muncul menanggapi perubahan situasi keamanan negara-negara oleh negara terdekat (Collins, 2000). Selain itu, menurut beberapa teoretisi *defensive realism* dilemma keamanan merupakan sumber logika dari *defensive realism*, hal ini dikarenakan dilemma keamanan memicu kerjasama antara negara diluar aliansi untuk menghadapi musuh bersama.

More importantly, the security dilemma is central to the logic of defensive realism (Glaser 1994–1995, 54; 2003, 406; Kydd 1997b, 116; Schweller 1996, 116). The security dilemma is arguably the theoretical linchpin of defensive realism because for defensive realists it is the security dilemma that makes possible genuine cooperation between states beyond a fleeting alliance in the face of a common foe (Tang, A Theory of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism, 2010)(p. 33)

Melihat lebih lanjut, memasuki masa setelah perang dingin telah terjadi perubahan pandangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam melihat dan menjaga keamanan (Collins, 2000).

Munculnya berbagai konflik territorial yang belum terselesaikan ditambah konflik maritim yang muncul serta kemudahan negara ASEAN dalam memperoleh senjata canggih semakin meningkatkan intensitas dilemma keamanan (Sulistyo, 2012).

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan lebih jauh menggunakan desain kualitatif eksplanatif. Penelitian eksplanatif dalam kualitatif menurut Neuman (2007) adalah penelitian yang menggambarkan sebab dari suatu kejadian kemudian melihat relasi nya dengan teori yang ada. Melalui penggunaan desain kualitatif eksplanatif, diharapkan dapat menggambarkan bagaimana embargo senjata yang dijatuhkan AS mempengaruhi perkembangan kekuatan militer RI, hingga akhirnya memunculkan perjanjian kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Sumber data sekunder merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian, observasi, informasi, tulisan instansi terkait yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Ada berbagai macam tingkatan analisa yang dapat digunakan dalam penulisan ataupun penelitian dalam studi hubungan internasional. Salah satu model tingkat analisa yang sering digunakan ialah model tingkat analisa untuk menyusun kerangka berpikir menggunakan tingkatan secara individu, negara dan sistem internasional yang dipelopori oleh Kenneth Waltz seperti dikutip dalam Mas'ood (1994). Dalam penelitian ini, tingkat analisa yang digunakan ialah sistem internasional untuk melihat bagaimana embargo senjata AS mempengaruhi munculnya kerjasama teknik militer antara RI dan Rusia pada tahun 2003. Analisa yang digunakan dalam tingkat analisa sistem internasional ialah melihat bagaimana perilaku aktor-aktor hubungan internasional menghadapi perubahan atau fenomena internasional. Dalam penelitian ini analisa sistem internasional digunakan untuk melihat bagaimana perilaku negara yakni RI menghadapi perubahan yang terjadi akibat embargo sehingga mendorong munculnya sebuah kerjasama keamanan.

Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dengan kajian kepustakaan

dan metode dokumenter. Kajian kepustakaan yakni dengan mencari data maupun informasi dari buku, jurnal dan lainnya (Soewandi, 2003). Sementara, metode documenter yakni metode yang digunakan untuk menelusuri data historis seperti otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku catatan harian, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, data di *server* ataupun *flashdisk*, data tersimpan di *web site* dan lain sebagainya (Bungin, 2007). Data yang dihimpun merupakan data sekunder yang ditemukan oleh melalui metode kajian kepustakaan dan dokumenter selanjutnya akan diolah untuk menemukan bagaimana embargo senjata yang dijatuhkan AS pada Indonesia berpengaruh terhadap munculnya kerjasama teknik militer Indonesia-Rusia tahun 2003.

Penelitian ini memiliki beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber data karena tergolong dalam penelitian yang mengangkat isu keamanan lebih dari satu negara sehingga data-data yang dirilis ke public cukup dikendalikan oleh negara. Selain itu, menurut Dimitry.O Rogozin, Wakil Perdana Menteri Rusia (2014), meskipun kerjasama antara Indonesia dan Rusia ini berjalan cukup baik akan tetapi setiap perkembangan dan hasil yang diterima kedua belah pihak tidak selalu diberitakan kepada publik karena kerjasama di bidang keamanan termasuk ke dalam isu sensitif baik bagi Rusia maupun Indonesia. Hal ini cukup membatasi peneliti dalam menjelajah data lebih jauh untuk mencari berbagai fakta yang mendukung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman Keamanan RI

Ancaman keamanan merupakan ancaman yang cukup membahayakan kepentingan nasional negara. Republik Indonesia yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami ancaman keamanan karena letak geografisnya yang cukup strategis. Permasalahan ancaman keamanan yang muncul biasanya karena terjadi perubahan situasi keamanan dari negara-negara sekitar yang memiliki kemampuan militer lebih baik. Perubahan modernisasi terutama dalam bidang militer

yang dilakukan oleh suatu negara dapat menjadi ancaman bagi negara lain yang sering disebut sebagai *security dilemma* atau ancaman keamanan (Jervis, 1978). Posisi Indonesia di Asia Tenggara sendiri cukup strategis dengan jumlah wilayah kedaulatan dan jumlah penduduk terbanyak dibanding negara Asia Tenggara lainnya yakni dengan luas wilayah sebesar 1.890.754 km² dan jumlah penduduk sebanyak 240.271.522 orang (ASEAN, 2012).

Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk, sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki kekuatan militer yang memadai. Tidak hanya untuk menjaga keamanan warga negaranya, tetapi juga menjaga kepentingan Indonesia dalam permasalahan mengenai kedaulatan wilayah seperti melindungi pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Indonesia maupun dalam memperlancar masalah penyelesaian batas wilayah maritim untuk menambah posisi tawar Indonesia.

Permasalahan mengenai konflik batas wilayah maritim merupakan salah satu permasalahan yang dimiliki setiap negara yang memiliki wilayah laut yang luas seperti Indonesia sehingga kemampuan militer yang siap menjadi salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh Indonesia. Menjaga wilayah laut yang dimiliki juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kepentingan nasional sebuah negara, sehingga sudah sewajarnya Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militer lautnya agar memiliki posisi tawar dalam setiap penyelesaian wilayah maritim yang menumpuk. Berikut daftar rekapitulasi status penyelesaian wilayah maritim antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia (lihat tabel 1).

Tabel 1. Rekapitulasi Status Penyelesaian Batas Wilayah Maritim

No	Negara yang Berbatasan	Indonesia		
		Laut Teritorial	Landas Kontingen	ZEE (Zona Ekonom

				i Eksklusif)
1.	Australia	-	Selesai	Selesai
2.	Filipina	Belum Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai
3.	India	-	Belum Selesai	Selesai
4.	Malaysia	Belum Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai
5.	Republik Palau	-	Belum Selesai	Belum Selesai
6.	Papua Nugini	Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai
7.	Singapura	Belum Selesai	-	-
8.	Thailand	-	Belum Selesai	Selesai
9.	Timor Leste	Belum Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai
10.	Vietnam	-	Belum Selesai	Selesai

Sumber : Diolah dari *Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Selain penyelesaian batas wilayah maritim antara Indonesia dan negara-negara yang berbatasan belum tuntas, terdapat pula permasalahan sengketa wilayah perbatasan seperti pulau-pulau kecil terluar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana melalui data terakhir dari TNI yang dikutip dalam Kompas (2015) menyebutkan pulau Indonesia saat ini berjumlah 17.508 pulau dan diperkirakan semakin berkurang. Tentunya hal ini menjadi salah satu ancaman keamanan bagi Indonesia karena pulau-pulau terluar tersebut bisa saja memiliki kekayaan alam yang belum tersentuh seperti migas (minyak-gas) maupun kekayaan laut seperti ikan dan terumbu karang yang akhirnya dimanfaatkan ataupun diklaim oleh negara lain.

Terdapat sebelas negara yang mengelilingi Indonesia, yang mana Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste berbatasan langsung serta sisanya yakni Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand dan Cina yang tidak berbatasan langsung (Sulistyo, 2012). Dari berbagai negara yang mengelilingi Indonesia tersebut, masih terdapat banyak permasalahan teritorial yang belum terselesaikan bahkan antar negara Asia Tenggara sekalipun, berikut Tabel 2 yang menunjukkan daftar berbagai

masalah teritorial antara negara anggota ASEAN.

- Sengketa perbatasan antara Thailand dan Myanmar
- Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand
- Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Kamboja
- Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Vietnam pada garis demarkasi di landas kontinen sekitar Pulau Natuna
- Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Vietnam pada garis demarkasi lepas pantai antar kedua negara
- Permasalahan saling klaim antara Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina atas Pulau Spartlys
- Permasalahan saling klaim antara Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan, Sebatik, dan Ligitan serta perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan
- Sengketa Kepemilikan atas Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura

Sumber : Collins, A. *The Security Dilemmas of Southeast Asia*, MacMillan, London (2000)

Tabel 2 menunjukkan adanya permasalahan menyangkut teritorial antar negara anggota ASEAN yang telah diselesaikan maupun yang masih berlanjut tanpa penyelesaian yang pasti. Permasalahan mengenai batas wilayah antar negara yang berdekatan cukup berbahaya untuk mengundang konflik. Berbagai permasalahan mengenai klaim teritorial tersebut menyangkut kedaulatan (*supreme authority*) sebuah negara yang mana menjaga kedaulatan merupakan

pemenuhan kepentingan nasional negara Dalam memenuhi kepentingan nasional tersebut dibutuhkan kesiapan militer negara yang mumpuni. Atas latar belakang tersebut, kondisi pertahanan dan militer Indonesia yang stagnan akibat embargo mendorong Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menjalin kerjasama dengan negara yang bersedia untuk membantu kekuatan pertahanan dan militer Indonesia.

Hubungan Kerjasama Hingga Embargo Antara RI dan AS

Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan AS, memiliki sejarah hubungan yang cukup panjang mulai dari kerjasama di berbagai bidang salah satunya kerjasama keamanan, hingga keputusan embargo senjata yang dijatuhkan oleh AS pada Indonesia tahun 1999. Hubungan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan AS dapat dikatakan sebagai hubungan yang cukup strategis. Hal ini dapat dilihat dari persenjataan militer Indonesia saat itu yang 70 persen berasal dari militer AS dan merupakan berbagai realisasi dari kesepakatan antara Indonesia dan AS (Sulistyo, 2012).

Hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah terjalin cukup lama sejak pemerintahan Presiden Soeharto dan AS menjadi salah satu partner penting Indonesia dalam invasi ke Timor-Timor tahun 1975. AS menjadi partner penting Indonesia dalam bidang militer karena merupakan pemasok utama persenjataan tentara Indonesia (Winarso, 2013). Menurut Winarso (2013), AS memberikan senjata dan suku cadang senilai USD 328.000.000 dan hampir USD 100.000.000 dalam ekspor senjata komersial untuk Indonesia pada tahun 90an hingga memasuki tahun 2000. Pelatihan militer yang diberikan juga cukup signifikan dengan dana lebih dari USD 7.500.000 yang dialokasikan oleh Departemen Pertahanan AS melalui program *International Military Education and Training* (IMET) untuk tentara Indonesia. Dukungan senjata serta pelatihan militer dari AS ini dimanfaatkan dengan baik oleh militer Indonesia (*US Department of Defense, Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales and Foreign Military*

Construction Sales and Military Assistance Facts, 1999).

Permasalahan mulai muncul ketika berbagai dukungan militer yang diperoleh Indonesia dari AS dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan militernya untuk mempertahankan wilayah Timor-Timur sebagai salah satu wilayah kedaulatan Indonesia hingga memakan korban ratusan jiwa. Timor-Timur sendiri berupaya memperoleh kemerdekaannya sejak tahun 1975. Selama periode tersebut berlangsung, AS terus memberikan dukungan militer kepada Indonesia dengan mentransfer lebih dari USD 1 miliar persenjataan yang dipergunakan untuk melawan baik serangan militer maupun sipil di Timor-Timur (Hartung & Washburn, 1997).

Sejak invasi tidak resmi Indonesia pada 1975 ke wilayah Timor-Timor yang saat itu baru merdeka dari kolonialisme Portugis terjadi berbagai insiden kekerasan yang melibatkan baik militer maupun sipil dan memakan korban jiwa (Chomsky, 1999). Berbagai peristiwa yang terjadi selama periode itu melibatkan kekerasan militer Indonesia yang merenggut nyawa ratusan orang seperti pada insiden Santa Cruz tahun 1991 sehingga memunculkan berbagai tuduhan secara tidak langsung yang menjatuhkan nama baik AS sebagai *partner* Indonesia. Pemerintah AS kemudian mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman (embargo) segala jenis persenjataan serta amunisinya maupun pelatihan yang telah disepakati sebelumnya kepada militer Indonesia.

Embargo senjata Indonesia oleh Amerika Serikat resmi dilakukan pada tahun 1999. Embargo sendiri merupakan pelarangan perniagaan yang dilakukan oleh satu atau kelompok negara terhadap negara lain untuk membatasi dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit (Rachmawatie, 2014). Terminologi mengenai embargo senjata yang dikutip dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) No.1390 (2002) menunjukkan bahwa embargo senjata merupakan bentuk pelarangan akan *supply* atau pasokan baik senjata, maupun suku cadang dan apapun yang berkaitan dengan aktifitas militer kepada pihak (negara) yang biasanya menerima pasokan tersebut.

Embargo memiliki berbagai jenis, namun dalam penelitian ini embargo khusus mengarah pada embargo senjata. Jenis persenjataan sendiri sangat beragam sehingga dalam penelitian ini dibatasi pada jenis senjata utama atau *major weapon system* yang mana dalam istilah militer Indonesia disebut alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Embargo yang dijatuhkan oleh AS dan Uni Eropa kepada Indonesia tersebut tidak ditentukan batas waktu penerapannya (Kompas, 2000). Tidak hanya persenjataan yang diembargo oleh AS, semua pembelian suku cadang serta produk amunisi buatan AS, hingga segala jenis jasa pemeliharaan, juga pendidikan dan latihan baik melalui program *United States Force Foreign Military Sale* (USAF FMS) maupun jalur komersial juga diberhentikan sebagaimana dikatakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hanafie Asnan periode 1998-2002 yang dikutip dari Kompas (2000). Selain itu menurut Hanafie (2000), embargo di bidang jasa pemeliharaan bukan hanya terkait fasilitas pemeliharaan yang berada di AS akan tetapi termasuk seluruh fasilitas pemeliharaan di seluruh dunia yang berada dibawah lisensi AS, tentunya hal ini sangat merepotkan bagi Indonesia yang 70 persen alutsistanya berasal dari AS.

Dampak Embargo Senjata Oleh AS Terhadap RI

Embargo yang dijatuhkan oleh AS sejak 12 September 1999 memberikan dampak signifikan bagi militer Indonesia. Selama masa pemberlakuan embargo senjata tersebut, militer Indonesia mengalami berbagai situasi yang tidak menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan kekuatan militer Indonesia sebelum diembargo memiliki berbagai jenis senjata yang diimpor dari AS serta berbagai jenis pelatihan tentara lewat hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Kekuatan militer Indonesia yang saat itu hampir 70 persen suku cadangnya berasal dari AS, terkena dampak yang paling besar atas keputusan embargo ini (Sulistyo, 2012).

Segala jenis persenjataan yang dimiliki Indonesia kemudian tidak mendapat perawatan yang semestinya karena berbagai jenis jasa pemeliharaan persenjataan turut diembargo. Hal ini

menyulitkan posisi Indonesia yang saat itu tidak memiliki kemampuan untuk pemeliharaan serta peremajaan senjata (*arms maintenance*) karena sebagian besar jasa pemeliharaan senjata berada dibawah lisensi AS. Selain berpengaruh terhadap pemeliharaan senjata, embargo ini turut berpengaruh pada kemampuan operasional TNI yang turun hingga 50 persen sebagaimana dikatakan oleh Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan Indonesia periode 1999-2000 dalam Kompas (2000). Selain itu, embargo ini telah mengikis kemampuan operasional militer Indonesia secara substansial. Kekuatan militer Indonesia sendiri bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mana mencakup tiga angkatan bersenjata yakni TNI-AD (Angkatan Darat), TNI-AU (Angkatan Udara) dan TNI-AL (Angkatan Laut).

Sudarsono (2000), menambahkan bahwa TNI-AU adalah pihak yang paling dirugikan akibat embargo senjata AS. Menurut Suwardjo seorang analis militer dan pertahanan yang dikutip dari Sulisty (2012), embargo senjata AS ke Indonesia sangat berpengaruh terutama pada pesawat tempur karena dapat dilihat dari 10 pesawat tempur F-16 dengan tipe F-16 A dan tipe F-16 B varian Block 15 OCU, hanya tersisa empat unit yang bisa beroperasi akibat suku cadang untuk pemeliharaan diembargo. Tidak hanya pesawat tempur tipe F-16, kesulitan yang sama juga dialami 20 unit Hercules jenis C-130 yang kemudian setelah mengalami embargo hanya dapat dipergunakan sebanyak 6 unit untuk keperluan alat angkut militer.

Bappenas (2008) melaporkan bahwa untuk kekuatan TNI AU pada tahun 2005, pesawat terbang dari berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya siap 48,65 persen, dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya siap 50 persen. TNI Angkatan Laut (AL) juga mengalami kesulitan akibat embargo terhadap suku cadang peralatan sensor dan senjata torpedo jenis Harpoon. TNI AL menjadi terkendala dalam mengatur jadwal pemeliharaan dan pengoperasian akibat tidak dapat dilaksanakan kalender kerja yang telah direncanakan, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Achmad Sutjipto dalam Kompas (2000).

Sementara itu, kekuatan TNI AL berupa kapal perang (KRI) yang jumlahnya

114 unit, hanya siap 53,51 persen; kendaraan tempur marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, hanya siap 36,09 persen; dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya siap 31,48 persen (Bappenas, 2008). TNI Angkatan Darat (AD) juga mengalami kesulitan sebagaimana yang dihadapi TNI AU dan TNI AL. Pada tahun 2005 kekuatan TNI AD mengalami penurunan kekuatan, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit hanya siap 60,99 persen; kendaraan bermotor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, siap hanya 85,04 persen; dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya siap 50,82 persen.

Akibat embargo senjata dari AS ini kesiapan kekuatan baik TNI-AD, TNI-AL serta TNI-AU menurun dan cukup banyak alutsista yang tidak dapat beroperasi karena ketiadaan suku cadang. Hal ini sangat menyulitkan, terutama karena Indonesia memiliki wilayah luas baik wilayah daratan, laut, maupun udara dan dikhawatirkan akan berbahaya apabila timbul permasalahan lain yang tidak terduga, seperti bencana alam tsunami dan pelanggaran wilayah teritorial jika TNI tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut. Embargo senjata yang dialami Indonesia tersebut tidak dapat dihindari membawa berbagai perubahan bagi Indonesia terutama militernya. Terjadi banyak perubahan akibat situasi embargo senjata yang dialami Indonesia, seperti menurunnya kesiapan militer serta munculnya ancaman keamanan bagi Indonesia akibat perubahan kemajuan militer negara-negara di sekitar Indonesia. Saat Indonesia mengalami embargo senjata oleh AS, terjadi situasi yakni negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara melakukan modernisasi militer dengan meningkatkan anggaran belanja pertahanan. Situasi ini membuat Indonesia mengalami ancaman keamanan terutama dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Review dari NIDS (*National Institute Defense Studies*) tahun 2002 mengatakan bahwa negara ASEAN telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan peralatan militer mereka sejak pulih dari krisis ekonomi tahun 1997. Kelima negara yang paling besar dalam belanja pertahanannya selama tahun fiskal 2005 yakni, Singapura (USD 5,57 Miliar),

Malaysia (USD 2,47 Miliar), Thailand (USD 1,95 Miliar), Filipina (USD 840 Miliar) dan Vietnam (USD 3,47 Miliar). Tentunya peningkatan anggaran belanja pertahanan negara-negara yang letaknya cukup dekat dengan Indonesia menimbulkan ancaman keamanan bagi Indonesia. Malaysia misalnya membeli 48 unit tank jenis PT-91M senilai USD 650 juta dari Polandia, 18 unit pesawat tempur jenis Su-30MKM dari Rusia dan tiga unit helikopter jenis *Superlinx* dari Inggris pada tahun 2002. Pembelian berbagai peralatan militer tersebut merupakan salah satu bentuk upaya memperbaharui militer Malaysia (*East Asian Strategic Review*, 2004). Singapura juga menjalin kerjasama dengan Perancis pada tahun 2004 melalui pembelian enam *frigate* (*frigate* pertama kelas *Lafayette*; RSS *Formidable*) yang diikuti dengan transfer teknologi melalui lisensi perusahaan kapal selam asal Perancis pada Singapura dalam pembuatan *frigate* kedua dan seterusnya (*East Asian Strategic Review*, 2004).

Upaya penguatan militer Singapura tidak hanya dengan menjalin kerjasama dengan Perancis tetapi juga membeli 20 unit helikopter serbu jenis AH-64D *Apache Longbow* pada tahun 2004 dari AS yang dikirimkan pada tahun 2006 (*East Asian Strategic Review*, 2006). Menurut hasil *review* dari NIDS (*National Institute for Defense Studies*, Tokyo, 2006) untuk tahun fiskal 2004 terdapat dua negara dengan kecenderungan terbesar dalam peningkatan anggaran belanja pertahanan yakni Singapura dengan USD 5 Miliar dan disusul dengan Malaysia sebesar USD 4,3 Miliar. Pada tahun fiskal 2004 Singapura tidak hanya menjadi negara dengan anggaran belanja pertahanan terbesar tetapi juga memutuskan untuk bergabung lewat SCP (*Security Cooperation Participant*) yakni program yang dipimpin Amerika Serikat bernama *System Development and Demonstration Phase JSF (Joint Strike Fighter)*. Peningkatan anggaran belanja militer negara-negara yang dekat dengan Indonesia, serta ditambah dengan kesiapan militer yang menurun hingga 50 persen membuat Indonesia sudah sewajarnya merasa terancam dengan situasi keamanan disekitarnya (Sulistyo, 2012).

Selain itu, menurut data dari Departemen Pertahanan RI kekuatan kendaraan tempur Indonesia pada tahun

2005 hanya dapat dioperasikan sebesar 60,99 persen dengan perhitungan sekitar 1.077 unit yang layak pakai dari jumlah awal sebesar 1.766 unit. Pada tahun 2005, pertahanan Indonesia termasuk “*under capacity*”, apabila disejajarkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia berada pada peringkat terbawah (Herdiani, 2012). Sehingga dapat disimpulkan dampak embargo senjata oleh AS pada Indonesia menyebabkan menurunnya kesiapan militer serta meningkatnya ancaman keamanan yang dialami Indonesia selama masa periode embargo tersebut.

Kerjasama Teknik Militer RI-RUSIA Tahun 2003

Indonesia mendapatkan berbagai dampak yang kurang menguntungkan akibat embargo senjata oleh AS tersebut. Melihat lebih jauh, Indonesia yang mengalami peningkatan ancaman keamanan akibat embargo senjata tersebut sudah sewajarnya untuk mencari jalan keluar dengan menjalin kerjasama keamanan dengan negara lain. Keputusan Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Rusia ini bukan hanya sekedar untuk membantu kekuatan pertahanan dan militer Indonesia namun juga untuk memperluas pengaruh Indonesia terutama di kawasan Asia Tenggara.

Seperti telah disebutkan, Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara merupakan negara yang secara alamiah memprakarsai kemajuan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga berada di posisi strategis jalur perdagangan internasional dengan banyaknya persoalan maritim yang belum terselesaikan menjadi salah satu alasan Indonesia untuk mengatasi persoalan militernya yang menurun akibat embargo dengan menjalin kerjasama keamanan. Indonesia memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Tenggara dan menjadi inisiator di belakang layar dalam berbagai kegiatan menyangkut ASEAN. Untuk tetap menjaga pengaruh Indonesia yang dominan di ASEAN, Indonesia memerlukan kekuatan militer yang baik sehingga mampu memenuhi kepentingan nasionalnya dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan yang ada. Dalam menyikapi hal tersebut, Indonesia sebagai sebuah negara yang besar sudah sewajarnya untuk meningkatkan

kemampuan militer dengan menjalin kerjasama keamanan terutama bersama negara lain yang aman dari ancaman embargo. Indonesia mengambil keputusan untuk menjalin kerjasama teknik militer dengan Rusia pada masa Indonesia masih dalam situasi embargo senjata oleh AS. Hal ini tentunya merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah Indonesia saat itu. Melihat lebih jauh, pada tahun 1999 saat Indonesia di embargo oleh AS, posisi peringkat kekuatan militer dunia ditempati oleh dua negara besar yakni AS dan Rusia yang merupakan pecahan terbesar dari Uni Soviet. Selain itu, posisi ranking militer Rusia saat itu menduduki posisi terbesar kedua setelah AS (SIPRI, 2003).

Selain itu, Indonesia memilih Rusia sebagai *partner* dalam kerjasama teknik militer ini dikarenakan Rusia sebagai negara yang tidak menuntut berbagai syarat diluar kesepakatan. Hal ini tersirat pula secara resmi oleh Alexander Ivanov selaku Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Rusia merupakan hubungan yang sehat tanpa kewajiban apapun diluar kesepakatan.

“Saat ini kami sedang mengembangkan persiapan teknis militer basis baru. Kami tidak menempatkan politik atau prasyarat lainnya dalam mengembangkan kerjasama teknis militer dengan Indonesia” (Voice of Indonesia, 2008)

Kerjasama antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan dan memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Baik pemerintah Indonesia maupun Rusia telah bersepakat untuk membangun kerjasama yang lebih menguntungkan. Sementara menunggu AS mencabut secara penuh embargonya yang mana tidak diketahui kepastiannya, Indonesia semakin terdesak akan kebutuhan pertahanan hingga melakukan kerja sama teknologi alat-alat militer dengan negara lain yang memiliki kemampuan teknologi kemiliteran lebih maju (Novana, 2012). Selain itu, peningkatan anggaran belanja militer negara-negara tetangga Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran dalam kondisi perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Indonesia kemudian menjalin kerjasama dengan negara-negara yang bersedia

menjalin kerjasama pertahanan dan militer dengan Indonesia.

Sebelum terwujudnya kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2003, Menteri Luar Negri Indonesia yakni Dr Hassan Wirajuda mengunjungi Moscow pada tahun 2002 yang mana kunjungan ini merupakan kunjungan pertama oleh Menteri Indonesia sejak keruntuhan Uni Soviet. Selain itu, Letjen Hari Sabarno, wakil ketua MPR-RI selama 1999-2001, mengatakan bahwa akan lebih baik jika Indonesia menempuh cara lewat membina kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki sumber daya dan teknologi yang sesuai dengan peralatan militer Indonesia sehingga tidak harus tergantung pada satu negara saja yakni AS (Kompas, 2000). Mahfud MD, Menteri Pertahanan Indonesia periode 2000-2001, juga menyebutkan bahwa dalam menghadapi embargo senjata AS telah ada inisiatif untuk bekerja sama dengan negara lain seperti Cina, Korea dan Rusia serta negara lainnya (Kompas, 2000).

Presiden Abdurahman Wahid kemudian menyatakan niatnya untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia dengan AS melalui kerjasama dengan negara lain salah satunya seperti Rusia untuk membangun industri persenjataan dalam negeri. Laksamana Widodo AS, Panglima TNI 1999-2002, dalam Kompas (2000) menjelaskan bahwa kerjasama militer yang dilaksanakan oleh TNI merupakan bagian dari kerjasama pertahanan yang selalu mengacu pada satu konsep, yakni prinsip saling percaya satu sama lain (*confidence building measures*) yang dapat diterapkan melalui banyak cara seperti pertukaran personil militer (*military personal exchange*), kunjungan dan pertukaran pelajar, juga kerja sama teknis yang terkait dengan pemeliharaan alutsista.

Selanjutnya pada April 2003, Presiden Megawati berkunjung ke Moscow yang mana merupakan kunjungan pertama setelah Presiden Soeharto pada tahun 1989. Dalam kunjungan ini Presiden Megawati dan Presiden Putin menandatangani Deklarasi Tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Dalam Abad Ke 21, yang mana deklarasi ini mencakup beberapa area kebijakan termasuk investasi, pariwisata serta IPTEK. Tidak hanya

penandatanganan deklarasi saja tetapi juga terjadi sebuah tahap baru dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia terutama di bidang kerjasama keamanan.

Bagaimanapun, kerjasama di bidang keamanan antara Indonesia dan Rusia merupakan kunci utama dalam deklarasi ini. Salah satunya dapat dilihat dengan ditandatanganinya persetujuan untuk pembelian 6 pesawat jet tempur dari Rusia dan pembayarannya menggunakan cara barter komoditi seperti kelapa sawit dan lainnya. Pada April 2003, Presiden Megawati tidak hanya menandatangani deklarasi kerangka hubungan dengan Rusia, atau sekedar melakukan pembelian pesawat jet tempur, tetapi juga mengukuhkan hubungan lebih lanjut lewat Persetujuan Kerjasama Teknik Militer Indonesia dan Rusia. Persetujuan antara Indonesia dan Rusia tentang Kerjasama Teknik Militer ini merupakan perjanjian kerjasama di bidang keamanan yang dilakukan Indonesia dalam masa embargo senjata oleh US sebelum akhirnya embargo resmi dicabut pada tahun 2005.

Kedua pihak yakni Indonesia diwakili oleh Departemen Pertahanan RI dan Rusia diwakili oleh Komite Federasi Rusia untuk Kerjasama Teknik-Militer dengan Negara-Negara Asing (*FSMTCR - Federal Service for Military-Technical Cooperation Rusia*) dalam pelaksanaan persetujuan ini. Kemudian, dalam persetujuan kerjasama teknik militer tahun 2003 ini Indonesia menerima 4 pesawat sukhoi yang belum dipersenjatai dan dilanjutkan dengan bulan November tahun berikutnya Indonesia berkerjasama dengan *Rosoboronexport* untuk penyediaan 12 pesawat lebih lanjut, tujuannya adalah untuk membentuk setidaknya dua squadrons. Meskipun kemudian sempat tertunda akibat bencana Tsunami yang melanda Indonesia pada Desember 2004, Indonesia tetap melanjutkan rencana 12 pesawat lanjutan ini hingga tahun 2010.

Persetujuan ini merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam usaha untuk meningkatkan kemampuannya, melalui persetujuan kerjasama ini. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2005, TNI-AL mengajukan permohonan kepada pemerintah sebesar US \$ 1,9 Miliar untuk pembelian 6 kapal selam kelas kilo dari Rusia, meskipun pada akhirnya ditunda karena kurangnya pendanaan. Tidak hanya TNI-AL, tetapi TNI-AU juga memperbaharui

peralatan militer yang kadaluarsa, dengan bantuan Rusia. TNI-AU mengupayakan sekitar 20 pesawat taktis dari jenis Sukhoi (modifikasi lanjutan dari Su-27 Flanker) dan 15 helikopter, termasuk sepuluh Mi-17 dan Mi-5, penambahan ini akan ditambahkan selain enam platform pada batch awal dari kerjasama teknik militer pemerintah Indonesia dari Rusia pada tahun 2003. Selanjutnya perkembangan persetujuan kerjasama teknik militer ini mulai diwujudkan dengan membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTMM) yang ditandatangani di Rusia pada 22 September 2005 kemudian direalisasikan lewat penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Indonesia dan Rusia mengenai Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia tahun 2006-2010 serta bantuan kredit hingga USD 1 Miliar untuk kepentingan militer. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vladimir Putin di ruang Malachite Fuyet, Istana Kepresidenan Rusia (Novana, 2012).

Tujuan dari MoU ini ialah untuk melaksanakan segala ketentuan dalam persetujuan Kerjasama Teknik Militer tahun 2003 sebelumnya. Melalui MoU ini Indonesia melalui Departemen Pertahanan dapat mengirimkan permintaan kepada pihak Rusia untuk bertukar informasi mengenai kerjasama tertentu dalam lingkup kontrak yang direncanakan sesuai dengan persetujuan mengenai perlindungan bersama terhadap Informasi Rahasia yang telah disepakati antara Indonesia dan Rusia pada tahun 2004 (Kemlu, 2004). Melalui MoU ini Indonesia melakukan berbagai modernisasi alutsista, dengan memanfaatkan fasilitas kredit dari Rusia senilai USD 1 Miliar yang cukup efisien, karena tidak memakai *management fee* dan syarat lainnya (Sulistyo, 2012). Penawaran kredit sebesar 1 Miliar Dollar AS dari Pemerintah Rusia untuk periode 5 tahun yakni tahun 2006 hingga tahun 2010 untuk keseluruhan kebutuhan alutsista TNI sebesar USD 3,7 Miliar kemudian, dari total USD 3,7 Miliar untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI periode 2004-2009, diterima 1 Miliar Dollar AS yang digunakan untuk memenuhi pengadaan alutsista dari Rusia, sedangkan sisanya sebesar 2,7 Miliar Dollar AS rencananya akan

digunakan untuk memenuhi pengadaan alutsista dari negara-negara lain, seperti Amerika, Polandia, India, China dan Australia (Novana, 2012). MoU ini sangat menguntungkan Indonesia, dikarenakan sistem kredit negara antara Indonesia dengan Rusia, dilakukan dengan cara yang sederhana tanpa perantara ataupun perusahaan swasta terlibat melainkan langsung dengan perusahaan nasional milik Rusia dengan Departemen Pertahanan RI.

Kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia tahun 2003 ini merupakan hasil dari jalan keluar yang ditempuh Indonesia dalam mengatasi dampak embargo senjata yang dijatuhkan oleh AS. Dari kerjasama tersebut Indonesia kembali membangun hubungan harmonis dengan Rusia. Tindakan Indonesia yang berusaha menjalin kerjasama keamanan dengan Rusia dalam situasi menerima embargo senjata dari AS merupakan penerapan dari *Defensive Realism*. Tindakan ini didasarkan pada kebutuhan pemenuhan kepentingan nasional Indonesia akan keamanan nasional dan ancaman keamanan (*security dilemma*) yang menuntut untuk segera diatasi. Sehingga berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa embargo senjata yang dijatuhkan oleh AS tahun 1999 kepada Indonesia berpengaruh terhadap terbangunnya kerjasama teknik militer antara RI dan Rusia tahun 2003.

5. KESIMPULAN

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang berdinamika sesuai perubahan perpolitikan dunia. Berbagai permasalahan yang muncul salah satunya seperti embargo senjata yang dijatuhkan AS pada Indonesia tahun 1999 akibat permasalahan Timor-Timor menghasilkan sebuah respon yang dapat dianalisa lebih jauh. Terjadinya embargo tersebut membuat Indonesia berada pada situasi yang tidak menguntungkan akibat stagnannya militer dan meningkatnya berbagai ancaman keamanan dari negara-negara di sekitar sehingga Indonesia merespon dengan melakukan kerjasama teknik militer terutama dengan Rusia pada tahun 2003.

Tindakan Indonesia dalam menghadapi embargo dengan cara melakukan kerjasama keamanan dengan negara lain secara nyata merupakan

bentuk penerapan dari *Defensive Realism*. Selanjutnya situasi *security dilemma* atau ancaman keamanan yang dialami Indonesia merupakan inti dalam teori *Defensive Realism*. sehingga semakin menguatkan hasil penelitian ini bahwa kerjasama teknik militer antara RI dan Rusia pada tahun 2003 muncul akibat terpengaruh dari embargo senjata AS dan merupakan tindakan Indonesia secara *Defensive Realism*.

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dilihat. *Pertama*, kebijakan embargo senjata yang dijatuhkan oleh sebuah negara dapat mempengaruhi kesiapan militer negara lain karena menyebabkan penurunan kemampuan militer. *Kedua*, kemampuan militer sebuah negara yang menurun mengakibatkan munculnya ancaman keamanan bagi negara tersebut karena kekhawatiran akan ketidakmampuan dalam mengatasi maupun berjaga-jaga terhadap situasi keamanan disekitarnya.

Ketiga, penurunan kemampuan militer sebuah negara dapat diatasi dengan melakukan kerjasama keamanan dengan negara lain yang kemampuan militernya lebih baik meskipun berasal dari lain kawasan. *Keempat*, kebijakan sebuah negara terkait pelarangan terutama embargo dapat mempengaruhi munculnya kerjasama keamanan yang mana dilakukan oleh negara yang mengalami embargo untuk memenuhi kepentingan nasional dari ancaman keamanan disekitar kawasannya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa suatu negara seharusnya tidak bergantung kepada satu kekuatan tertentu dalam melakukan kerjasama. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa sebuah negara dalam menghadapi ancaman keamanan tidak selalu harus bergabung dalam sebuah organisasi keamanan internasional secara khusus, akan tetapi dapat pula mencoba untuk melakukan kerjasama keamanan dengan negara lain meskipun berada di kawasan berbeda.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ashley J. Tellis, J. B. (2000). *Measuring National Power in the Postindustrial Age*. California: RAND Corporation.

Brigjen TNI Dody Usodo Hargo S, S. (n.d.). *Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional*. Diakses pada, 30 November 2014, from Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional: <http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-indonesia>

Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Collins, A. (2000). *The Security Dilemma of Southeast Asia*. London: MacMillan.

Daftar Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Negara Anggota ASEAN melalui website resmi ASEAN : www.asean.org/ Diakses pada 13 Desember 2014

Damgaard, E. (1980). *The Dilemma Of Rational Legislative Action: Some Danish Evidence*. In L. Lewin, & E. Vedung, *Politic As Rational Action Essays in Public Choice and Policy Analysis* (pp. 217-230). Holland: D. Reidel Publishing Company.

Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Dewan Pertahanan RI.

Department of Defense of the United States of America. (2006). *Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms*. USA: Joint Chiefs of Staff.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, Departemen Pertahanan Republik

- Indonesia. (2006). *Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar*. Jakarta: Departemen Pertahanan.
- DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI, RI. (2013). *DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL*. Diakses pada, 16 Oktober 2014, from KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA: http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?fullPage=1&Treaty%5Bcountry_id%5D=113&Treaty%5Bwork_field_id%5D=83
- Dougherty, J. E., & Jr, R. L. (1995). *Teori-Teori Hubungan Internasional terjemahan oleh Amien Rais*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Elman, C. (2008). Realism. In P. Williams, *Security Studies An Introduction*. Oxon: Routledge.
- Grevatt. (2008, February 13). Indonesia Calls a Halt to use of Ageeing Equipment. *Jane's Defence Weekly*, 18.
- Haryanto, F. D. (2014, Agustus 17). *MNC Corporation*. Diakses pada, 28 Januari 2015, from SINDO NEWS: <http://nasional.sindonews.com/read/892215/14/industri-pertahanan-asing-berebut-masuk-indonesia-1408273628>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Muraviev, A., & Brown, C. (2008). Strategic Realignment or Déjà vu? Russia-Indonesia Defence Cooperation in 21st Century. *Working Paper (The Australian National University. Strategic and Defence Studies Centre) no.411, 1, 1-42*.
- National Institute for Defense Studies (NIDS). (2004). *East Asian Strategic Review*. Tokyo: The National Institute for Defense Studies Japan.
- National Institute for Defense Studies (NIDS). (2000). *East Asian Strategic Review*. Tokyo: The National Institute for Defense Studies Japan.
- National Institute for Defense Studies (NIDS). (2006). *East Asian Strategic Review*. Tokyo: The National Institute for Defense Studies Japan.
- National Institute for Defense Studies (NIDS). (2007). *East Asian Strategic Review*. Tokyo: The National Institute for Defense Studies Japan.
- Novana, R. F. (2012, Februari). Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009. *Journal Transnasional Universitas Riau*, 2-19.
- Paret, P. (1989). Military Power. *The Journal of Military History*, 240 vol 53.
- Pohan, H. (2004). *IAIN SYEKH NURJATI CIREBON*. Diakses pada 16 Januari 2014, from IAINCIREBON: <http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Mixed/18-LectureUI.pdf>

- Sakti, T. W. (2009). *Digital Library UNIKOM*. Diakses pada, 27 November 2014, from Pengaruh Kerjasama Militer Indonesia-Rusia Terhadap Perkembangan Kekuatan TNI-AU (Tahun 2003-2010): http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbp_tunikompp-gdl-triyawibaw-26714
- Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional. (2010). *Dewan Ketahanan Nasional Indonesia*. Diakses pada, 10 Februari 2015, from DKN web site: http://www.dkn.go.id/site/images/publikasi/Kamnas_wantannas.pdf
- Sejarah dan Kelengkapan Tentara Nasional Indonesia melalui website resmi TNI : www.tni.mil.id/ Diakses pada 13 Desember 2014
- Sejarah Hubungan Kerjasama Indonesia dan Rusia melalui website resmi kedutaan besar Rusia untuk Indonesia : www.indonesia.mid.ru/ Diakses pada 2 November 2014
- Sulistyo, I. (2012). Kebijakan Pertahanan Indonesia 1998-2010 Dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di Asia Tenggara. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia.
- Surya, A. (2010). *Pustaka Ilmiah Universitas Padjajaran*. Diakses pada 16 Oktober 2014, from Pustaka Unpad: http://pustaka.unpad.ac.id/wpc/ontent/uploads/2010/11/antara_indonesia_dan_rusia.pdf
- Supriyanto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tang, S. (2010). *A Theory of Security Strategy For Our Time: Defensive Realism*. US: Palgrave MacMillan.
- The Jakarta Post. (2005, September 28). *ETAN ORGANIZATION*. Diakses pada, 01 Februari 2015, from ETAN ORGANIZATION: <http://www.etan.org/et2005/sep/tember/05/28russia.htm>
- Tsyganov, M. (2007). *RUSSIA BEYOND THE HEADLINES*. Diakses pada, 16 Oktober 2014, from RUSSIA BEYOND THE HEADLINES INDONESIA: http://indonesia.rbth.com/technology/2014/02/07/marinirnya_indonesia_senjata_rusia_23159.html
- U.S-ASEAN Security Relations : Challenges and Prospects. (1989). *Contemporary Southeast Asia* , 11 (1), 1-39.
- Voice of Indonesia. (2008). *kerjasama militer indonesia rusia Voice of Indonesia Siaran Luar Negeri RRI*. Diakses pada, 17 Januari 2015, from VOI|Voice of Indonesia Siaran Luar Negeri RRI: <http://id.voi.co.id/berita-indonesia/kesenian-dan-kebudayaan/1225-kerjasama-militer-indonesia-rusia.html>